

# Ketua DPRA Batal ke Kemendagri, Tolak Fasilitas APBA 2024

Category: Aceh

written by Redaksi | 05/03/2024



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Telepon (0651) 32138 (hunting) / Fax (0651) 21638

Banda Aceh, 04 Maret 2024 M  
23 Sya'ban 1445 H

Nomor : 005 / 0350  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Hal : Undangan Rapat

Yang Terhormat,  
Pih. Direktur Jenderal Bina  
Keuangan Daerah  
di-  
Jakarta



[Orinews.id](http://Orinews.id) | Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli menolak menghadiri pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memfasilitasi penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2024.

Penolakan tersebut berdasarkan surat DPRA nomor 005/0350,

tertanggal, 4 Maret 2024, yang ditujukan kepada Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Gedung H, Lantai 8, Kompleks Kemendagri, Jakarta itu merupakan permintaan dari Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dengan tujuan agar Dirjen Bina Keuangan Daerah dapat memfasilitasi penetapan APBA 2024.

Dalam surat balasan itu, Ketua DPRA, Zulfadhli menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menghadiri undangan rapat tersebut. Menurutnya, persoalan APBA dapat diselesaikan secara internal pemerintahan Aceh jika Pj Gubernur dapat menunjukkan komitmen berkomunikasi yang baik dengan DPRA.

Zulfadhli juga meminta Pj Gubernur agar tidak memberi pernyataan melalui media massa yang dapat menimbulkan polemik terhadap penetapan APBA 2024 yang sampai saat ini belum diklarifikasi di DPRA oleh Pimpinan DPRA.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum dapat menghadiri pertemuan dimaksud dan memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Dirjen untuk memerintahkan kepada saudara Pj. Gubernur Aceh (tanpa diwakili) agar melakukan komunikasi yang arif dan bijaksana kepada pimpinan DPRA pada kesempatan pertama,” tulis Zulfadhli dalam surat tersebut yang diterima media ini, Senin (4/3/2024).

Sikap Zulfadhli ini bertolak belakang dengan permintaannya pada awal Desember 2023, ketika ia dan petinggi DPRA meminta Kemendagri untuk memfasilitasi pembahasan Rancangan APBA (RAPBA) 2024. Saat itu, pihaknya khawatir Achmad Marzuki akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBA 2024.

Seperti diketahui, bahwa penetapan APBA 2024 menjadi salah satu isu yang memanas di Aceh. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan anggaran rakyat Aceh itu bakal ditetapkan oleh pihak eksekutif dan legislatif.



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Telepon (0651) 32138 (hunting) / Fax (0651) 21636

Banda Aceh, 04 Maret 2024 M  
23 Sya'ban 1445 H

Nomor : 005 / 0350  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Hal : Undangan Rapat

Yang Terhormat,  
Pih. Direktur Jenderal Bina  
Keuangan Daerah  
di-  
Jakarta

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900.1.1/1514/Keuda tanggal 1 Maret 2024 perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan hormat kami sampaikan bahwa kami sangat memaklumi dan menghormati inisiatif Bapak Pih. Dirjen untuk memfasilitasi penetapan APBA Tahun 2024 yang dimohon oleh saudara Pj Gubernur Aceh, namun menurut hemat kami persoalan ini dapat diselesaikan secara Internal Pemerintahan Aceh jika Pj Gubernur Aceh dapat dengan menunjukkan komitmen berkomunikasi yang baik dengan DPRA, dan dengan tidak memberi pernyataan melalui media masa yang dapat menimbulkan polemik terhadap penetapan APBA yang sampai dengan saat ini belum diklarifikasi pada DPRA melalui Pimpinan DPRA.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum dapat menghadiri pertemuan dimaksud dan memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Dirjen untuk memerintahkan kepada Saudara Pj Gubernur Aceh (tanpa dwakil) agar melakukan komunikasi yang arif dan bijaksana kepada Pimpinan DPRA pada kesempatan pertama.
3. Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan terimakasih.

  
ZULFADLI, A.Md

Tembusan:  
Pimpinan DPR Aceh.

Surat balasan Ketua DPRA kepada  
Dirjen Bina Keuangan Daerah  
Kemendagri. |FOTO: Dok. Ist